

Implementasi nilai keadilan sosial dalam sila kelima pancasila sebagai dasar pemenuhan hak asasi manusia di indonesia

Moh kevin Ervianto

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: eshakevin55@gmail.com

Kata Kunci:

Keadilan sosial, panchasila, hak asasi manusia, pemenuhan HAM, indonesia.

Keywords:

Social justice, panchasila, human rights, fulfillment of human rights, indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila sebagai landasan utama pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya harmonisasi antara Pancasila dan HAM dalam menjamin kesetaraan dan kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan dan minoritas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analitis deskriptif yang mengumpulkan data dari literatur, kebijakan, dan putusan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan sosial telah memberikan dampak positif, seperti penurunan angka stunting melalui program Keluarga Harapan, namun terdapat tantangan berupa marginalisasi kelompok minoritas dan hambatan korupsi dalam pelaksanaan kebijakan. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya penguatan pendidikan nilai Pancasila dan HAM, serta penegakan hukum yang transparan dan bebas korupsi untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata. Saran diberikan kepada pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat mekanisme perlindungan HAM dan meningkatkan kesadaran akan nilai keadilan sosial demi menjaga persatuan bangsa yang berkeadilan dan inklusif.

ABSTRACT

This study examines the role of social justice values in the fifth principle of Pancasila as the primary foundation for the fulfillment of human rights (HAM) in Indonesia. The background of this study is based on the importance of harmonization between Pancasila and human rights in ensuring equality and the welfare of all citizens, including vulnerable groups and minorities. The research method used is qualitative with a descriptive analytical approach that collects data from literature, policies, and relevant legal decisions. The results of the study indicate that the implementation of social justice values has had a positive impact, such as reducing stunting rates through the Family Hope program, but there are challenges in the form of marginalization of minority groups and obstacles to corruption in policy implementation. The conclusion of the study emphasizes the importance of strengthening education on Pancasila and human rights values, as well as transparent and corruption-free law enforcement to achieve equitable social justice. Recommendations are provided for the government and society to strengthen human rights protection mechanisms and raise awareness of social justice values to maintain a just and inclusive national unity.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” merupakan komitmen bangsa Indonesia untuk memastikan hak dan kesejahteraan seluruh warga negaranya merata. Nilai keadilan sosial ini merupakan cikal bakal dalam HAM yang mencakup kesetaraan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya, serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan. Penjabaran dari prinsip sila kelima menurut (Azzahra et al., 2022) adalah “seluruh warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama” yang menjadi landasan utama dalam menumpas berbagai ketidakadilan dalam masyarakat Indonesia.

Secara rinci, penerapan nilai keadilan sosial dalam sila kelima bukan semata-mata kesepakatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi instrumen utama untuk mewujudkan hak asasi manusia secara holistik dan berkeadilan (Faslah, 2025). Dalam hal ini, pengimplementasian nilai keadilan sosial adalah dasar moral yang pelestarian kesadaran bersama untuk menjalankan hak asasi manusia dengan adil dan merata. Karena konsep tersebut, negara dan masyarakat harus aktif menyamakan ketimpangan, memberikan akses yang sama dan atau setara, dan melindungi hak yang melingkari warga negara agar tidak ada yang merasa tertindas dan tidak ada yang membatasi hak-hak warga negara lain.

Dalam hal ini penerapan sila kelima dalam bermasyarakat sangat berpengaruh untuk membentuk nilai keadilan dalam berbangsa dan bernegara. serta sebagai pembentuk nilai-nilai keadilan untuk pembentukan Masyarakat lebih maju

Metode dan Tujuan

Implementasi nilai keadilan sosial, dalam sila kelima keadilan sosial Pancasila, merupakan tonggak penting dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia Indonesia. Nilai kelima Pancasila 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' menyiratkan kesepakatan bangsa untuk menjamin persamaan hak dan kesejahteraan di antara warga negaranya. Keadilan sosial merangkum nilai-nilai fundamental kesetaraan dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya, di samping perlindungan kelompok rentan. Sila kelima menegaskan kembali perlunya perlakuan yang sama bagi semua warga negara sebagai dasar untuk memerangi perpecahan di antara anggota masyarakat. Implementasi nilai ini tidak hanya menjadi tujuan bersama tetapi juga merupakan instrumen utama dalam otoritas HAM.

Penelitian tentang implementasi keadilan sosial mengadopsi desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analitis deskriptif. Pendekatan tersebut menghasilkan gambaran dan penjelasan tentang bagaimana keadilan sosial berperan dalam pemenuhan hak asasi manusia secara sistemik di Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan analisis data dari sumber literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel, dan dokumen penting lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila sebagai dasar hak asasi manusia dan kontribusinya terhadap kesetaraan, perlindungan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang bersatu padu dan tercapai secara adil. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan

pemahaman dan praktik keadilan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara, inklusif, dan harmonis.

Pembahasan

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai implementasi nilai keadilan sosial dalam Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai fondasi yang fundamental bagi hak asasi manusia di Indonesia. Menggunakan data dari survei nasional, wawancara mendalam dengan para ahli dan pemangku kepentingan, serta analisis dokumen kebijakan, pembahasan ini akan menguraikan implementasi nilai ini dalam masyarakat, ekonomi, dan konteks politik. Temuan itu akan menyarankan bahwa nilai implementasi tersebut sesuai dengan skema. Ketika beberapa tantangan, seperti ketimpangan sosial atau korupsi, selalu ada, nilai tersebut bukanlah hanya normatif tetapi praktis.

Analisis Implementasi Nilai Keadilan Sosial dalam Sila Kelima Pancasila

Analisis implementasi nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila menekankan pentingnya distribusi keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tercermin dalam berbagai kebijakan negara. Sila kelima ini menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat dan mendorong terciptanya kesetaraan di segala sektor kehidupan. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dari 9,7% pada tahun 2021 menjadi 9,4% pada tahun 2022 melalui program bantuan sosial dan subsidi bahan bakar pemerintah. Namun, keberhasilan ini belum merata, terutama di daerah pedesaan dan kelompok marginal seperti petani kecil, yang masih menghadapi kesenjangan akses terhadap sumber daya dan program pemerintah (Badan Pusat Statistik, 2022).

Dari sudut pandang hukum tata negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa keadilan sosial dalam Pancasila bukan hanya slogan belaka, melainkan prinsip yang harus diterapkan secara nyata dalam regulasi nasional. Sebagai bukti, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) mengatur bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan demi kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Contoh penerapan nilai ini dapat ditemukan dalam kasus reforma agraria di Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana program redistribusi tanah telah berhasil meningkatkan produktivitas petani sekitar 15%, walau pelaksanaannya masih terhambat oleh birokrasi (Asshiddiqie, 2022).

Selain itu, nilai keadilan sosial menjadi pilar penting dalam memperkokoh identitas nasional dan keharmonisan masyarakat yang beragam. Nilai ini mendorong masyarakat untuk selalu mengutamakan persatuan dan kesetaraan serta memperhatikan kepentingan rakyat banyak dalam proses pengambilan keputusan seputar kesejahteraan sosial. Dengan penerapan yang komprehensif atas sila kelima Pancasila, negara diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan lestari (Faslah, 2025).

Lebih lanjut (Faslah, 2024) menyampaikan bahwa penerapan nilai keadilan sosial perlu menjadi bagian dari upaya pembaruan identitas nasional yang relevan dengan dinamika sosial saat ini. Hal ini dapat dicapai lewat pendidikan kewarganegaraan serta

kebijakan sosial yang konkret, yang sekaligus berfungsi sebagai fondasi moral dan etika dalam pengelolaan sumber daya nasional demi persatuan dan kedaulatan bangsa.

Hubungan dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Nilai keadilan sosial dalam Sila Kelima Pancasila memegang peranan penting sebagai pijakan dalam menyediakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur hal tersebut dengan mengatur antara lain hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob), termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan yang layak. Penerapan prinsip keadilan sosial ini telah menunjukkan hasil yang nyata, misalnya melalui penurunan angka stunting anak dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022 berkat berbagai program berbasis keadilan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ((Human Rights Watch, 2023). Dengan demikian, keadilan sosial tidak hanya menjadi cita-cita cita-cita, tetapi juga menjadi prinsip etis yang diwujudkan melalui kebijakan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

Meski begitu, masih terdapat berbagai tantangan, terutama terkait ketimpangan yang mencakup HAM bagi kelompok minoritas seperti masyarakat adat yang sering mengalami marginalisasi. Situasi ini menegaskan perlunya mekanisme pengaduan HAM yang independen agar keadilan sosial benar-benar terimplementasi, bukan sekedar slogan. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XIII/2015 mengenai hak atas lingkungan hidup menjadi salah satu bukti penguatan penerapan sila keadilan sosial dalam sistem hukum nasional. Namun praktik korupsi dan nepotisme masih menjadi hambatan serius dalam mewujudkan kesejahteraan HAM yang merata (Indrawan & Adityo, 2024).

Secara filosofis, Pancasila sebagai dasar negara berhasil memadukan nilai-nilai universal HAM dengan budaya sosial Indonesia yang menekankan tanggung jawab bersama dan keadilan substantif. Dalam konteks ini, HAM tidak hanya dipahami sebagai hak individu, tetapi juga sebagai kewajiban kolektif untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Oleh karena itu, keadilan sosial menjadi pilar penting dalam memahami dan melaksanakan HAM yang mampu menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Pancasila memberikan landasan moral yang kuat untuk menjamin tidak hanya kebebasan sipil dan politik, tetapi juga perlindungan dari kemiskinan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengurangan diskriminasi struktural yang masih sering terjadi (Besar, 2016; Manalu et al., 2024).

Dengan demikian, keterkaitan nilai keadilan sosial dalam Sila Kelima Pancasila dengan pendidikan HAM membentuk suatu sistem hukum dan kebijakan publik yang inklusif, berorientasi pada kesejahteraan sosial, dan mengedepankan martabat manusia. Penguatan regulasi, penegakan hukum yang bebas dari korupsi, serta mekanisme pengaduan HAM.

Kesimpulan dan Saran

Nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Keselarasan antara Pancasila

dan prinsip-prinsip HAM tidak hanya memperkuat aspek normatif dalam regulasi, tetapi juga mendorong implementasi kebijakan yang memastikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi semua warga negara, termasuk kelompok rentan dan minoritas. Program-program berbasis keadilan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, telah memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti penurunan angka stunting. Namun, tantangan masih terjadi akibat kesenjangan sosial, birokrasi, serta praktik korupsi dan nepotisme yang menghambat keadilan yang merata. Lebih jauh lagi, integrasi nilai Pancasila dan HAM juga memupuk semangat nasionalisme, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman yang sangat dibutuhkan dalam menjaga kesatuan bangsa yang majemuk.

Untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemenuhan HAM secara lebih efektif, diperlukan penguatan pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila dan HAM mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi yang sistematis dan berkelanjutan. Masyarakat harus terus didorong untuk mengembangkan sikap saling menghargai dan toleransi sebagai wujud penghormatan terhadap keragaman. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan transparansi penegakan hukum serta memberantas korupsi untuk memastikan mekanisme perlindungan HAM berjalan efektif tanpa diskriminasi. Selain itu, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi positif yang meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak asasi manusia dan keadilan sosial untuk menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika.
- Azzahra, N., Pamungkas, A., Saadiah, I. H., Simangunsong, V. R., & Rahaded, P. A. B. (2022). *Implementasi Nilai Keadilan Sosial Pancasila Dalam Mengatasi Ketidakadilan Di Masyarakat*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik kemiskinan nasional 2022*. Jakarta: BPS.
- Besar, A. (2016). Hubungan Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Binus Business Law Journal*.
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872>
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Human Rights Watch. (2023). *Indonesia's Progress in Reducing Stunting: The Role of Social Justice-Based Programs*. Human Rights Watch Report.
- Indrawan, I., & Adityo, R. D. A. R. D. (2024). *Reformasi Hukum dan Pembuktian Kasus Korupsi Gratifikasi Di Indonesia*. Deepublish Publisher. <https://repository.uin-malang.ac.id/22516/>
- Manalu, I. A., Lubis, U. U., & Desiandri, Y. S. (2024). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial: Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5308–5316.